

... kasus-kasus penjarahan uang triliunan rupiah yang terus dilindungi demi kepentingan politik serta penjarahan sumber daya alam atas nama "pembangunan", yang sebenarnya tidak lebih dari proyek dan pemburuan rente, adalah kejahatan besar yang tak pernah dianggap sebagai kejahatan.



# KORUPSI

yang

# MEMISKINKAN

*Poverty is the worst form of violence*  
(Kemiskinan adalah bentuk terburuk dari kekerasan)  
MAHATMA GANDHI

Editor: **Maria Hartiningsih**



# KELUAR DARI LINGKARAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Heru Nugroho<sup>1</sup>

Pedagang: "Kamu belum begitu siang begini sedang apa duduk santai di bawah pohon?"

Nelayan: "Memangnya kenapa?"

Pedagang: "Kok tidak melaut lagi cari ikan, kan masih jam segini?"

Nelayan: "Kalau cari ikan lagi memang kenapa?"

Pedagang: "Ya biar hasil tangkapanmu lebih banyak?"

Nelayan: "Kalau tangkapanku lebih banyak, memang kenapa?"

Pedagang: "Ya kan penghasilanmu kan lebih banyak?"

Nelayan: "Kalau penghasilanku lebih banyak memang kenapa?"

Pedagang: "Ya kamu bisa punya kapal sendiri dan punya pabrik pengolahan ikan?"

Nelayan: "Kalau aku punya kapal dan pabrik memang kenapa?"

<sup>1</sup> Guru Besar Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Pedagang: "Ya kamu kan jadi kaya dan bisa menikmati hidup di dunia to."

Nelayan: Lho kau pikir aku di sini ngapa?"

Pedagang: "Lho lha iya kamu itu ngapain di sini sekarang ini?"

Nelayan: "Lho kamu itu bagaimana to, ya aku ini sedang menikmati dunia..."

Penggalan dialog di atas merupakan percakapan antara nelayan dengan seorang pedagang pengepul ikan di Pantai Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta, yang menggambarkan bagaimana moral dan kultur yang berkembang dalam komunitas nelayan. Kultur semacam itu juga berkembang di kalangan komunitas petani miskin pada umumnya, yang kemudian dikenal sebagai petani subsisten. Dalam pandangan kaum kulturalis, faktor-faktor kultural menjadi salah satu penyebab utama mengapa petani tradisional tetap hidup miskin. Sedangkan pendekatan struktural meyakini bahwa penyebab utama kemiskinan adalah faktor struktur yang tidak adil dan mapan buatan manusia itu sendiri.

Selama ini memang terdapat dua pendekatan ketika akan melihat permasalahan kemiskinan, yaitu pendekatan kultural dan struktural. Dari kubu kulturalis, Boeke<sup>2</sup> dengan tesis "dualisme sosial-ekonomi" misalnya, berpendapat bahwa tidak munculnya petani kaya di Jawa karena memang bermental malas dan tidak punya spirit yang menjadi prasyarat masuk dalam sistem ekonomi modern. Kultur yang berkembang dalam warga petani tradisional tidak rasional, dan tidak mempunyai keterampilan wirausaha (*entrepreneurship*) yang

2. J.S. Boeke, *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*, New York: Institute of Pacific Relations, 1953.

merupakan prasyarat mutlak bagi pelaku ekonomi yang ingin terlibat dalam pergulatan sistem ekonomi pasar.

Lembaga sosial, khususnya nilai-nilai sosial, di daerah pedesaan terutama diarahkan untuk menjamin keamanan kebutuhan hidup seluruh anggota masyarakat.<sup>3</sup> Dengan kata lain, masyarakat desa yang memiliki karakter komunal masih memegang teguh nilai-nilai kebersamaan, kolektivisme, dan relasi sosial yang bersifat emosional. Oleh karena itu, budidaya pertanian lebih merupakan usaha kolektif untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Nilai individualisme tidak berkembang yang merupakan bibit bagi berkembangnya usaha yang bersifat rasional. Masih berkembangnya institusi sosial yang moralistik tersebut berlawanan dengan nilai yang berlaku dalam perekonomian modern yang mengandalkan mekanisme pasar yang tidak mempunyai kandungan moral. Sistem perekonomian modern yang mengandalkan mekanisme pasar tidak akan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan petani tradisional di pedesaan. Justru yang terjadi sebaliknya, sistem perekonomian pasar akan semakin mengkondisikan warga masyarakat petani di pedesaan ke dalam situasi sulit dan menyengsarakan yang memarginalkannya dari beroperasinya sistem ekonomi pasar (*immiserizing market economy*).

Sementara itu Clifford Geertz dengan tesis involusi pertaniannya mengatakan bahwa perekonomian berbasis pertanian atau ekonomi agraris tidak mempunyai basis untuk bertransformasi menjadi sebuah perekonomian modern yang dinamis dalam tatanan perekonomian pasar. Menurut Geertz pada era pemerintahan Kolonial Belanda, baik budidaya perkebunan di daerah pegunungan maupun daratan,

3. J.C. Scott, *The Moral Economy of the Peasant*, New York: Yale University Press, 1976.

para pengusaha baru itu diharuskan untuk menggunakan tenaga kerja petani dengan sistem upah. Jadi bukan lagi dengan sistem kerja rodi, di mana tenaga kerja tidak diupah sama sekali. Periode pasca tanam paksa ini, merupakan periode diperkenalkannya sistem upah bagi petani dan sistem sewamenyewa lahan garapan. Tahap-tahap itulah yang menurut Geertz merupakan tahap krusial bagi munculnya proses involusi, di mana petani tidak lagi mampu menjadikan usaha pertanian mereka secara intensif. Bersamaan dengan itu, sektor produksi tidak mengalami pertumbuhan atau bahkan langka tidak seperti di Jepang. Akibatnya, pertumbuhan tenaga kerja tidak tertampung pada sektor industri, tetapi mau tidak mau harus ditampung pada sektor pertanian. Proses inilah yang menimbulkan perumitan-perumitan di sektor pertanian, tetapi tetap bisa di atasi oleh masyarakat pedesaan Jawa melalui sistem ekologi sawah dan kebudayaan. Meski sektor pertanian tidak mengalami pertumbuhan, tetapi tetap mampu menjadi wahana untuk bertahan hidup, dan inilah yang memunculkan petani subsisten.

### **Kemiskinan struktural**

Dalam pandangan strukturalis, kemiskinan yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor kemalasan, hambatan badaniah, atau pun bencana alam, melainkan lebih disebabkan oleh faktor struktural buatan manusia itu sendiri. Artinya kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur-struktur buatan manusia, baik struktur ekonomi, politik, sosial dan struktur budaya. Inilah yang dikenal sebagai kemiskinan struktural, kemiskinan yang dibuat oleh manusia, dari manusia, dan terhadap manusia pula.

Kemiskinan buatan—dalam banyak hal—terjadi bukan karena seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena mereka terus-menerus sakit. Berbeda dengan perspektif modernisme yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras, kemiskinan buatan dalam perbincangan di kalangan ilmuwan sosial acapkali diidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural. Menurut Selo Soemardjan (1980), yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Secara teoritis, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada ketimpangan struktur sosial, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, mereka hanya mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.

White<sup>4</sup> misalnya, dengan menggunakan pendekatan Marxian ia tidak sependapat dengan Geertz yang mengatakan

4. B. White, "Agriculture Involution and Its Critics: Twenty Years After", *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 15, 1983, hal. 18-31.

adanya hubungan yang saling menguntungkan antara sistem perkebunan dengan sistem lokal yang subsisten. Menurut White hubungan tersebut justru bersifat eksploitatif di mana dalam proses cara produksinya (*modes of production*) yang kapitalistik cenderung menghisap sektor tradisional. Proses pengisapan itu terutama sangat terlihat pada rendahnya upah tenaga kerja yang diberikan kepada petani oleh pemilik modal dengan tujuan agar tingkat hidup penduduk lokal tetap berada dalam subsisten. Belum lagi intervensi kebijakan pemerintah kolonial yang memang secara sengaja mengkondisikan agar para petani tidak mampu memproduksi secara intensif, dengan mendukung sistem upah tenaga kerja yang rendah, tetapi tetap harus ikut program perkebunan yang diprakarsai oleh pemerintah. Dengan demikian, intervensi pemerintah sengaja mengkondisikan agar petani tidak berdaya dan berkembang secara otonom untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sementara itu, menurut Collier petani tidak berinovasi tetapi berevolusi, berubah atau maju tapi lambat sekali. Revolusi Hijau lebih mempertajam perbedaan si kaya dan si miskin di desa. Struktur kelembagaan di pedesaan justru berubah ke arah yang lebih memperlemah kedudukan petani kecil dan buruh tani.<sup>5</sup> Warga masyarakat petani, dan penduduk desa pada umumnya mempunyai ciri yang terus melekat, yaitu kemampuan wirausaha yang rendah, keterbatasan permodalan, dan produk yang inferior, sehingga membuatnya mempunyai posisi yang sangat lemah dalam persaingan pasar. Implikasinya, warga masyarakat petani cenderung menjadi obyek pasif dari eksploitasi oleh para pemilik modal dan pihak lain di luar warga pedesaan yang

5. Dikutip dari Mubyarto, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, Yogyakarta: BPFE, 1985.

mempunyai kepentingan untuk mencari keuntungan di sektor pertanian. Kehadiran teknologi pertanian yang masuk dalam paket modernisasi pertanian, bukan hanya tidak bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga sekaligus hanya akan memperlebar kesenjangan di kalangan perekonomian agraris, dan apalagi jika dibandingkan dengan sektor yang lainnya.

Oleh karena kemiskinan yang timbul lebih disebabkan oleh struktur yang mapan dan menindas, maka tawaran alternatif penanggulangnya adalah dengan mengubah struktur secara radikal menuju tatanan yang lebih adil. Akan tetapi, dalam banyak kasus, upaya mengubah struktur secara radikal seperti itu sulit dilakukan karena tidak pernah mendapat dukungan dari kelas menengah dan kelas atas yang mapan. Di Indonesia sendiri tuntutan perubahan struktur secara radikal seperti itu tidak pernah berhasil, bahkan Partai Komunis Indonesia yang secara sistematis telah mempersiapkan diri dalam paket perjuangan kelas, pada akhirnya juga menemui kegagalan.

### **Karitatif**

Sayangnya ketika pendekatan struktural kurang disukai di negeri ini karena memiliki watak ideologis, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang disukai oleh pemerintah selama ini lebih bersifat karitatif. Akibatnya telah berulang kali pemerintah melakukan upaya mengatasi kemiskinan, tetapi sebegitu jauh masih belum berjalan secara efektif. Sebagai ilustrasi misalnya, berbagai program telah dirumuskan dan dilaksanakan di lapangan, serta tidak sedikit pula dana telah dikucurkan ke masyarakat, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat



miskin—antara lain melalui pemberian bantuan dana IDT, JPS, PPK, BLT, Raskin, PNPM, dan lain-lain—membangun infrastruktur di permukiman kumuh, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan, dan lain-lain.

Untuk sebagian, berbagai bantuan dan program yang telah diupayakan pemerintah memang cukup bermanfaat. Namun, harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota yang hidup dibelit kemiskinan. Di sisi lain, tak bisa diingkari fakta, bahwa kendati jumlah orang miskin menurun, namun kesenjangan dalam banyak hal justru semakin lebar.

Contoh yang paling mutakhir penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai atau yang populer BLT kepada penduduk miskin melalui birokrasi pemerintah di daerah dan saluran langsung melalui pengiriman uang lewat pos dan telekomunikasi (postel). Dengan itu, diharapkan subsidi langsung tunai bisa langsung diterima dan digunakan oleh penduduk miskin tanpa rintangan prosedur birokrasi. Mekanisme pemberian subsidi langsung menggunakan sarana pos dan telekomunikasi bekerjasama dengan pemerintah daerah itu sendiri merupakan inovasi mekanisme pertama kali dilakukan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan.

Namun, persoalan kemudian muncul di lapangan berkaitan dengan perubahan penetapan garis kemiskinan yang digunakan dan jumlah angka kemiskinan atau penduduk miskin di suatu daerah yang akan diberi subsidi langsung

tunai berdasar kriteria kemiskinan yang ada. Pelaksanaan BLT ini sedikit terhambat dalam soal ini, terutama, pertama-tama, karena adanya perubahan dalam penetapan garis kemiskinan dilakukan akhir-akhir ini oleh pemerintah yang kemudian membawa implikasi pada penentuan jumlah penduduk miskin yang ada di suatu daerah.

Kebijakan alokasi dan distribusi subsidi anggaran pemerintah untuk masyarakat miskin dalam bentuk BLT ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di tengah situasi khusus adanya keterbatasan anggaran disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang memukul keseimbangan APBN. Sementara kebijakan peningkatan pendapatan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan terus dilakukan, kebijakan pemberian bantuan subsidi langsung tunai ini dilakukan dengan tujuan khusus, sebagai mekanisme penanggulangan kemiskinan secara langsung, untuk menanggulangi dampak kenaikan harga minyak terhadap lapisan masyarakat miskin yang rentan, atau sebagai mekanisme penyelamatan (*safety mechanism*) bagi masyarakat miskin dari turbulensi ekonomi pasar global yang memukul perekonomian nasional, sehingga keselamatan rakyat miskin tetap terjaga.

Selain itu, mekanisme langsung penanggulangan kemiskinan ini juga diharapkan akan meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup sehari-hari, sehingga tetap bisa akses pada berbagai sumberdaya pembangunan yang ada dan tersedia dari pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup lainnya.

## Kultur minta bantuan

Akan tetapi, model penanggulangan yang karitatif seperti itu mempunyai implikasi terhadap terbentuknya kultur *nyadong* atau hanya mengandalkan datangnya bantuan dari pemerintah. Dengan kata lain sekarang ini telah berkembang kultur meminta dalam masyarakat perdesaan, karena selama ini pemerintah adalah tumpuhan untuk pembangunan. Selama Orde Baru, bahkan desa senantiasa menjadi obyek penerima bantuan, dengan kompensasi politik untuk tetap loyal kepada pemerintah, dan senantiasa dikaitkan dengan komitmen mendukung Golkar. Kuningisasi (warna kuning merupakan simbol Golkar) adalah istilah yang sudah sangat populer di era kepemimpinan Soeharto, yang senantiasa mengaitkan bantuan pemerintah dengan jaminan akan mendukung Golkar. Berkembangnya kultur meminta bantuan itu, mempunyai implikasi pada perkembangan psikologi rakyat, yang terus ingin mendapat bantuan tanpa menunjukkan lebih dulu prestasinya dalam pembangunan.

Kecenderungan kultural seperti itu juga tampak ketika pemerintah senantiasa memberi bantuan untuk pembangunan infrastruktur ke desa-desa. Kebiasaan pemerintah memberi bantuan itu seketika menyurutkan tingkat partisipasi warga masyarakat dalam membangun dan memelihara infrastruktur. Tingkat partisipasi warga untuk ikut memelihara sarana publik bantuan pemerintah adalah rendah. Memudarnya nilai tanggung jawab ini merupakan implikasi logis dari pendekatan pembangunan yang selama ini bersifat *top down*, dari atas ke bawah. Bahkan partisipasi pembangunan itu sendiri dipahami sebagai seberapa jauh masyarakat melaksanakan program dari

atas. Masyarakat kurang dilibatkan dalam pembangunan sejak dari perencanaan, pengelolaan, hingga pemeliharannya.

Oleh karena itu, rasa keterlibatan rakyat terhadap berbagai program pembangunan yang datang dari atas relatif rendah. Mereka lebih banyak menjadi penonton dan penikmat sarana bantuan, dan kurang peduli dengan bagaimana kelanjutannya. Konsep pembangunan berkelanjutan yang dirancang sejak awal, sering kali gagal karena kurang menyentuh aspek manusianya yang berada di tengah pembangunan itu. Sudah sering terjadi, berbagai peralatan yang relatif mahal, terutama yang bersifat teknologis, menjadi mangkrak atau tidak terpakai karena kurang memperhatikan tumbuhnya partisipasi rakyat. Akibatnya, usia peralatan itu sendiri jauh lebih pendek dari yang diperkirakan, bahkan tidak jarang yang selesai dibangun tetapi terus tidak berfungsi.

### **Akar kemiskinan**

Menurut Izzedin Bakhit (2001) dalam bukunya berjudul *Menggempur Akar Kemiskinan*, saat ini yang dibutuhkan adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang dapat memberikan hasil yang nyata, tak pelak yang diusahakan adalah bagaimana mengontrol sebab-sebab dan menggempur akar-akar kemiskinan hingga tuntas (*attacking the roots of poverty*).

Lantas apa sebenarnya akar kemiskinan di Indonesia? Jika menggunakan perspektif teori modernisasi akar itu terletak pada tiadanya modal kultural yang dapat mendorong terjadinya transformasi ke corak kehidupan modern. Masyarakat miskin tidak punya kultur disiplin tinggi, etos kerja tinggi, budaya

malas, orientasi ke dalam, dan fatalistik, sehingga tidak bisa menjadi masyarakat transformatif ke sektor modern.

Meskipun perspektif teori modernisasi ini telah menuai banyak kritik, akan tetapi pada kenyataannya dalam masyarakat miskin di Indonesia memang masih banyak yang menunjukkan karakter tersebut sebagaimana diperlihatkan oleh seorang nelayan di Gunung Kidul pada awal tulisan ini. Oleh karena itu, perspektif ini juga bisa digunakan untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Berbagai upaya yang bertujuan untuk mengubah kultur warga masyarakat miskin memang perlu dilakukan agar mereka sendiri mampu keluar dari jeratan kemiskinan. Program-program penyadaran akan pentingnya meningkatkan etos kerja, belajar disiplin, rajin bekerja, askestisme duniawi, dan tidak menyerah pada nasib terus perlu dilakukan melalui berbagai forum pendidikan warga. Memang hasilnya memerlukan waktu agak lama, akan tetapi prasyarat kultural itu harus dipenuhi agar masyarakat miskin bisa transformatif ke sektor modern.

Sementara itu, jika mengikuti perspektif teori Marxian yang melihat kemiskinan sebagai masalah struktural, akar persoalannya adalah struktur eksploitatif buatan manusia. Pandangan ini juga sesuai dengan kenyataan di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun tidak secara radikal upaya mendorong ke arah struktur sosial yang lebih adil juga perlu terus dilakukan. Tidak perlu dengan penggalangan massa secara ideologis, tetapi kesadaran dari kalangan kelas menengah dan atas sendiri untuk ikut terlibat secara aktif dalam upaya membangun struktur sosial yang egaliter.

Jadi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia baik pendekatan kultural yang asumsinya dibangun dari teori

modernisasi, maupun pendekatan struktural yang asumsinya dibangun dari teori kritis Marxian, kedua-duanya bisa dipakai secara kombinatif. Strategi ini bisa dijalankan dengan efektif jika ditunjang oleh faktor kepemimpinan yang komitmennya terhadap kepentingan rakyat banyak adalah tinggi.

### **Kesederhanaan pemimpin**

Strategi tersebut antara lain bisa dicoba dengan menerapkan model kepemimpinan yang memberi teladan kesederhanaan. Harus diakui, sejak pemerintahan Orde Baru, boleh dikatakan bangsa ini semakin jarang dipimpin oleh pribadi-pribadi yang sederhana, atau mereka yang menanamkan nilai-nilai kesederhanaan secara kolektif kepada masyarakatnya untuk bersama-sama meraih cita-cita yang diharapkan. Sebagai egati berkembang, dan masih terbilang sebagai egati miskin, barangkali tidaklah berlebihan jika negeri ini membutuhkan pribadi pemimpin yang sederhana.

Terdapat banyak contoh pemimpin egati-negara berkembang yang patut diteladani karena telah berhasil menanamkan nilai-nilai kesederhanaan sehingga menjadi kesadaran kolektif di kalangan warga masyarakat yang dipimpinnya. Ho Chi Minh seorang pemimpin bangsa Vietnam terkenal dengan kesederhanaannya. Penampilannya bersahaja dengan senantiasa memakai sepatu dan sandal dari ban bekas, dan bila pergi naik pesawat selalu memilih pesawat komersial kelas ekonomi. Demikian pula Mahatma Gandhi, seorang pemimpin besar bangsa India, selalu menekankan pentingnya nilai kesederhanaan dan kerendahan hati untuk berjuang menjadi bangsa merdeka terbebas dari penjajahan. Ia pun senantiasa tampil sederhana dengan hanya memiliki

dua potong baju buatan bangsanya sendiri. Sementara itu, pemimpin bangsa Afrika Selatan, Nelson Mandela, adalah pemimpin yang sangat bersahaja, senantiasa memakai baju batik jika tampil di depan egati.

Di negeri kita sendiri juga pernah mempunyai pemimpin yang senantiasa menekankan pentingnya nilai kesederhanaan. Penampilan kesehariannya pun selalu bersahaja, tetapi dengan tetap penuh percaya diri. KH Agus Salim misalnya, adalah sosok pemimpin yang memiliki kepribadian sederhana, selalu tampil memakai sarung dan peci hitam, bahkan itu juga ia lakukan ketika mengikuti Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Demikian pula Sukarno dan Hatta, proklamator negeri ini, pada prinsipnya adalah sosok pemimpin yang sederhana. Meskipun Sukarno seorang *egativeg*, tetapi ia adalah pribadi sederhana dan tidak apresiatif terhadap materi, karena itu ia tidak menumpuk kekayaan selagi berkuasa. Apalagi Hatta, kesederhanaannya adalah menjadi prinsip hidup dan kepemimpinannya. Saat gaji sebagai Wakil Presiden akan dinaikkan, ia menolak dengan halus, karena ia tahu keuangan egati tidak cukup kuat, dan rakyat pun masih hidup melarat.

Apa yang mereka lakukan tentu jauh dari motif untuk sekadar tampil beda yang mencari perhatian atau berperilaku sok sederhana. Akan tetapi kesederhanaan itu memang muncul dari lubuk hatinya yang paling dalam, sebagai manifestasi dari sikap solider dengan rakyatnya yang kebanyakan masih miskin dan penuh penderitaan.

Apa urgensi dan relevansi perlunya pemimpin yang sederhana? Urgensi dan relevansi itu akan terasa kuat jika berkembang kesadaran bersama bahwa egati kita adalah masih miskin, atau dalam *egativegy* ekonomi politik masih

masuk kategori egati pinggiran. Barangkali sepakat, sebagai egati berkembang, masalah fundamental egati kita adalah masalah ketergantungan dengan egati-negara *egative* maju. Selama era Orde Baru, meskipun ada pencapaian luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik dalam jangka *egative* lama, tetapi satu hal yang tidak ega dipungkiri adalah, bahwa strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pertumbuhan, menempatkan egati kita dalam posisi ketergantungan yang serius. Situasi ketergantungan ini pun hingga sekarang masih terasa amat kuat. Dalam upaya mengurangi ketergantungan itulah, nilai-nilai kesederhanaan menjadi terasa penting dan sekaligus kita perlu mempunyai pemimpin yang berpribadi sederhana.

Kemandirian bangsa yang selama ini menjadi isu politik yang sering diangkat oleh jajaran pemimpin kita, tidaklah akan mendapatkan solusi efektif apabila para pemimpin tidak berhasil menanamkan nilai-nilai kesederhanaan sebagai kesadaran kolektif. Sebagai ilustrasi misalnya, anjuran untuk mencintai produk sendiri pada hakikatnya adalah kesediaan untuk menggunakan produk-produk sederhana dengan penuh kesadaran sekaligus penuh kebanggaan. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai kesederhanaan dengan menaruh apresiasi tinggi terhadap produk bangsa sendiri yang agraris.

Presiden Paraguay, Fernando Lugo misalnya, mencanangkan tekad untuk menjadi bangsa mandiri dengan menanamkan pentingnya nilai-nilai kesederhanaan. Ia bersedia menjalani hidup sederhana, karena di samping solider dengan rakyatnya yang masih miskin, juga mengkondisikan agar bangsanya, termasuk kelas atas bersedia menghargai produk masyarakat



agraris. Dengan cara itu, maka denyut ekonomi yang berbasis agraris terus terasa kuat dan petani pun menjadi sejahtera.

Demikian pula yang terjadi di India, perasaan bangga menggunakan produk sendiri tumbuh begitu kuat karena keberhasilan mewarisi nilai-nilai kesederhanaan yang diajarkan Gandhi. Meskipun tidak terlalu bagus, tetapi mereka dengan bangga menggunakan bajaj sebagai kendaraan utama, karena bagaimana pun bajaj adalah buatan sendiri. Jadi dengan jelas bahwa kemandirian sebuah bangsa akan berakar pada nilai-nilai kesederhanaan dan bersedia prihatin bukan hanya pada tataran individual, tetapi dalam tataran kolektif. Romo Mangunwijaya setelah melakukan perjalanan ke China pernah mengatakan bahwa keberhasilan RRC sebagai egati mandiri, antara lain keberhasilan para pemimpinnya menanamkan nilai kesederhanaan dan bersedia prihatin sebagai sebuah kesadaran kolektif.

Akan tetapi, harus diakui tidaklah mudah menjalani kehidupan sederhana ketika seseorang menjadi pemimpin, karena nilai-nilai kesederhanaan itu sendiri sudah semakin tidak kuat tertanam dalam struktur kesadaran para pemimpin dan bahkan masyarakat pada umumnya. Dinamika masyarakat terus berlangsung disertai transisi nilai-nilai dan orientasi. Arus manfaat dan motif laba yang dibawa oleh egati ekonomi terbuka, selain membawa kebaikan juga membawa dampak *egative*, yakni semangat mengejar keuntungan dan apresiasi materi yang semakin tinggi. Dalam situasi seperti itu, bicara tentang nilai-nilai kesederhanaan terasa seperti tidak *urgan* dan bahkan aneh. Kehendak untuk hidup dengan prinsip-prinsip kesederhanaan tentu akan mendapat saingan hebat dari semangat untuk mengejar keuntungan dan semangat konsumtif. ❖